

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Bank Umum Syariah

Praktik perbankan sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Namun praktik perbankan syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1983. Pada tahun itu bank sentral memberikan leluasa dalam menetapkan suku bunga. Dengan adanya deregulasi lembaga keuangan perbankan diharapkan dapat menciptakan kondisi perbankan yang lebih efisien guna menompang perekonomian suatu negara.

Dalam mendirikan bank syariah di Indonesia ini baru saja dilakukan pada tahun 1990. Dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18–20 agustus 1990, mengadakan rapat bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil dari rapat tersebut dibahas kembali dalam Musyawarah MUI yang langsung bertepatan di hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 agustus 1990. Oleh karena itu, berdasarkan Munas IV MUI selanjutnya dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia. Dimana kelompok kerja tersebut dijuluki dengan sebutan Tim Perbankan MUI.

Pertama kali perbankan syariah yang di dirikan di Indonesia ini ialah Bank Muamalat. Dimana pendirian bank muamalat pertama kali ini ditanda tangani pada tanggal 1 November 1991. Sembari penandatanganan

pendirian bank muamalat ini ternyata sudah terkumpul pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar.

Pada saat acara silaturahmi dengan presiden di Istana Bogor pada tanggal 3 November 1999, terdapat pemenuhan dalam penyeteran modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000. Tercukupinya modal perbankan tersebut maka bank muamalat mulai beroperasi mulai tanggal 1 Mei 1992 di Indonesia. Dan berkembangnya bank muamalat saat itu ditandai dengan banyaknya unit yang sudah tersebar di beberapa daerah meliputi Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Makasar, dan Balikpapan pada tahun 1999.

Sejak awal pendirian tersebut bank muamalat belum memperoleh perhatian yang optimal dalam industri perbankan nasional. Karena pada dasarnya landasan hukum yang digunakan ini menggunakan sistem syariah yang dapat diartikan penggunaan sistem bagi hasil. Dimana hal ini dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang sistem bagi hasil.

Pada era reformasi perbankan syariah ini ditandai dengan adanya persetujuan UU No. 10 Tahun 1998. Dimana isi dari UU tersebut menyempurnakan UU sebelumnya, yang lebih menjelaskan mengenai rincian landasan hukum dan jenis usaha yang dioperasikan serta diimplementasikan oleh bank syariah. Selain itu juga memberikan arahan kepada bank konvensional untuk membuka cabang bank syariah atau mengkonversikan menjadi bank syariah (Antonio, 2001).

Berlakunya Undang–Undang No. 10 Tahun 1998 ini memberikan landasan hukum lebih kuat pada perbankan syariah, sehingga mempermudah bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Berlakunya UU tersebut menyebabkan adanya *dual banking system* yakni bank syariah dan bank konvensional. Setelah itu di ikuti dengan berlakunya Undang–Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa perkembangan industri perbankan syariah semakin mempunyai landasan hukum yang cukup baik serta dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan perbankan.

Tabel 4.1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2015	2016	2017	2018
Bank Syariah				
Jumlah Bank	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1990	1869	1825	1875
Unit Usaha Syariah				
Jumlah Bank	22	21	21	20
Jumlah Kantor	311	332	344	354

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah-OJK Juni 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya bank umum syariah mengalami peningkatan, meskipun peningkatan tersebut bertambah satu namun hal ini masih berada dalam keadaan yang wajar. Peningkatan bank umum syariah tersebut terjadi pada tahun 2015 hingga tahun 2016 dari 12 jumlah bank menjadi 13 jumlah bank pada saat itu. Namun dalam periode 2017 jumlah bank umum syariah

tidak mengalami peningkatan maupun penurunan tetapi keadaan tersebut tetap berjumlah 13 bank, hanya saja seiring berjalannya waktu jumlah bank umum syariah mulai meningkat kembali menjadi 14 bank di tahun 2019. Meskipun jumlah bank setiap tahunnya mengalami peningkatan namun hal ini bertolak dengan jumlah kantor bank umum syariah. Jumlah kantor bank umum syariah tersebut sempat mengalami fluktuasi naik turun dari tahun 2015 hingga 2017, dimana penurunan tersebut terjadi dari jumlah kantor sebesar 1990 menjadi 1825 jumlah kantor. Meskipun periode 2017 mengalami penurunan yang cukup banyak tetapi pada tahun 2018 jumlah kantor bank umum syariah terjadi peningkatan, meskipun peningkatan tersebut tidak sebanyak ditahun 2015.

Perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana perubahan itu memberikan arti yang kurang signifikan. Artinya perubahan unit usaha syariah setiap tahunnya mengalami penurunan dari periode 2015 sejumlah 22 unit hingga periode 2018 sejumlah 20 unit. Meskipun terjadi penurunan setiap tahunnya namun hal ini di imbangi dengan meningkatnya jumlah kantor unit usaha syariah dari tahun 2015 sejumlah 311 hingga periode 2018 sejumlah 354 kantor unit usaha syariah. Artinya peningkatan jumlah kantor unit usaha syariah ini digunakan untuk mendongkrak jumlah bank yang relatif sedikit jumlahnya.

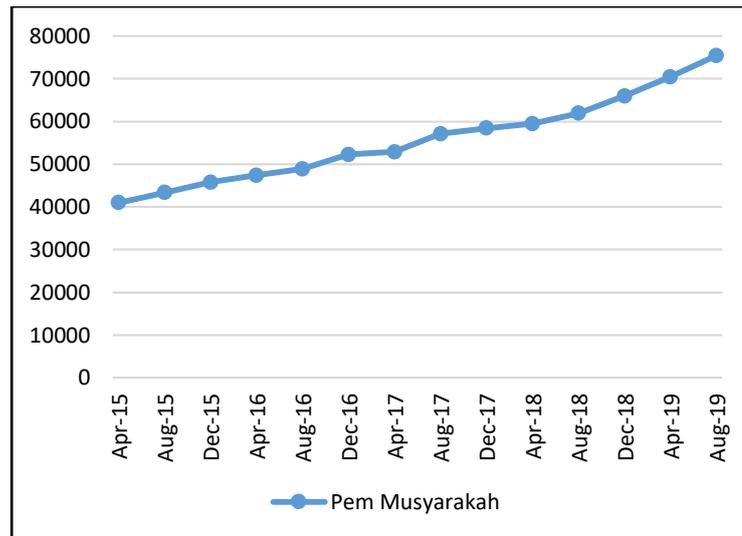
Pada akhirnya Bank Indonesia ingin mewujudkan sistem perbankan yang modern bersifat universal terbuka untuk masyarakat. Dengan tujuan

adanya sistem perbankan yang menghadirkan bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah, dalam konteks problematika yang sedang terjadi di Indonesia serta dapat memperhatikan sosial-kultural. Sehingga dengan adanya cara seperti itu dapat menarik perhatian masyarakat serta diterimanya sistem perbankan syariah dalam kehidupan masyarakat untuk memecahkan permasalahan negara (www.ojk.go.id).

2. Perkembangan Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk yang berasal dari bank umum syariah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih dan masing–masing pihak berkontribusi memberikan modal usaha, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan modal yang diberikan masing–masing pihak (Nofinawati, 2014).

Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia pada periode januari 2015 sampai dengan agustus 2019 dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Bulan	Apr-15	Aug-15	Dec-15	Apr-16	Aug-16	Dec-16	Apr-17
Pembiayaan	40947	43325	45742	47389	48908	52230	52854
Bulan	Aug-17	Dec-17	Apr-18	Aug-18	Dec-18	Apr-19	Aug-19
Pembiayaan	57102	58429	59454	61891	65937	70428	75445

Sumber data: SPS-OJK (data diolah)

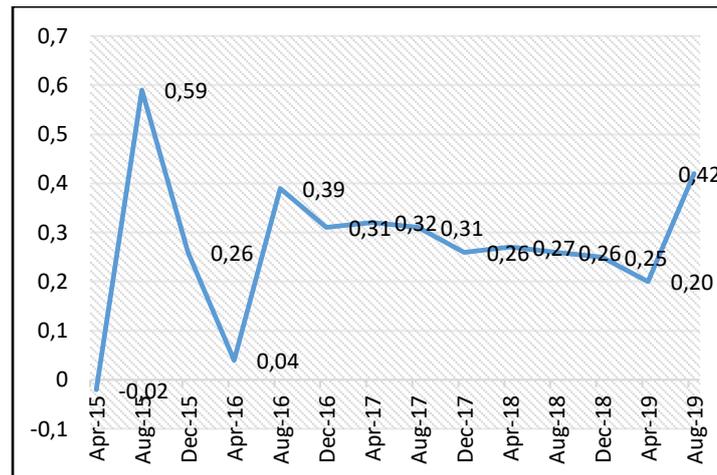
Gambar 4.1
Perkembangan Pembiayaan Musyarakah
(Miliar)

Melihat gambar grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2019 pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan yang cukup signifikan artinya perkembangan pembiayaan musyarakah tersebut dari tahun ketahun menunjukkan hasil yang positif pada peranan bank syariah di Indonesia. Dimana pembiayaan tertinggi tersebut berada dalam kuartal ke dua tahun 2019 sebesar Rp. 75.445 miliar sedangkan pembiayaan musyarakah terendah berada pada tahun 2015 sebesar Rp. 40.947 miliar.

Selama ini perkembangan pembiayaan musyarakah apabila dilihat setiap bulannya cenderung mengalami peningkatan meskipun dalam bulan tertentu sempat mengalami penurunan. Biasanya penurunan pembiayaan ini disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi atau bisa saja terjadi karena terdapat nasabah yang menggunakan produk lain selain pembiayaan musyarakah seperti halnya ialah ijarah, mudharabah, murabahah dan lain sebagainya yang menyebabkan pembiayaan musyarakah tersebut mengalami penurunan.

3. Perkembangan Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang cenderung berlangsung secara terus menerus. Sebagai bentuk makroekonomi atau sering disebut fenomena moneter inflasi memiliki pengaruh besar yang dapat menimbulkan masalah dalam perkeonomian negara. Inflasi adalah kenaikan harga komoditi dan jasa dalam jangka waktu yang panjang artinya jika kenaikan harga hanya terjadi dalam beberapa barang dan dalam tempo waktu yang singkat maka fenomena ini tidak bisa dikatakan sebagai inflasi (Yuliadi, 2016). Berdasarkan perolehan data perkembangan inflasi dari januari 2015 hingga agustus 2019 dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Gambar. 4.2
Perkembangan Inflasi
(Persen)

Melihat dari gambar grafik diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi dari tahun 2015 hingga agustus 2019 terjadi perubahan, dimana perkembangan inflasi tertinggi terjadi pada bulan agustus 2015 dan terendah ada pada bulan april 2015.

Rendahnya tingkat inflasi pada awal tahun 2015 ini disebabkan karena pada saat itu harga minyak global telah turun drastis dan hal itu terjadi sejak pertengahan 2014. Namun kondisi ini hanya bertahan di awal tahun saja dan pada saat pertengahan tahun mengalami inflasi yang disebabkan karena adanya kebijakan dalam penghapusan subsidi premium dan menetapkan kenaikan subsidi sebesar Rp. 1000 /liter untuk solar pada saat minyak dunia dalam kondisi baik. Sehingga kejadian tersebut menjadi sumber penyebab kenaikan inflasi pada pertengahan tahun 2015 (Indonesia-Invesment). Hal ini diperkuat juga dalam sumber berita Dkatadata (2019) yang menjelaskan bahwa tingginya tingkat inflasi di

tahun 2015 ini disebabkan karena kenaikan bahan bakar minyak (BBM) selain itu disertai dengan kenaikan harga pangan maupun harga komoditi. Terjadinya kenaikan harga atau komoditi ini disebabkan karena permintaan masyarakat selama bulan ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri.

Kenaikan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2015 ini disebabkan karena kenaikan harga yang ditunjukkan dengan naiknya indeks pengeluaran yakni: kelompok bahan makan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, olahraga, dan kelompok transport, komunikasi dan keuangan. Sedangkan pada tahun 2015 inflasi tertinggi ini ada pada kota Merauke yang mencapai 2,87%. Sedangkan inflasi terendah ada pada kota Cirebon yang mencapai 0,27% (Badan Pusat Statistik).

Pada tahun 2015 inflasi yang tinggi ini dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian global yang berasal dari luar negeri. Selain itu karena adanya fundamental yang masih lemah, dilaksanakannya *fixed subsidy* harga jual subsidi dan adanya penyesuaian pada tarif listrik dan LPG tabung 12 kg serta adanya problem suplai bahan pokok yang diprediksi berdampak pada besarnya nilai inflasi (www.dpr.go.id).

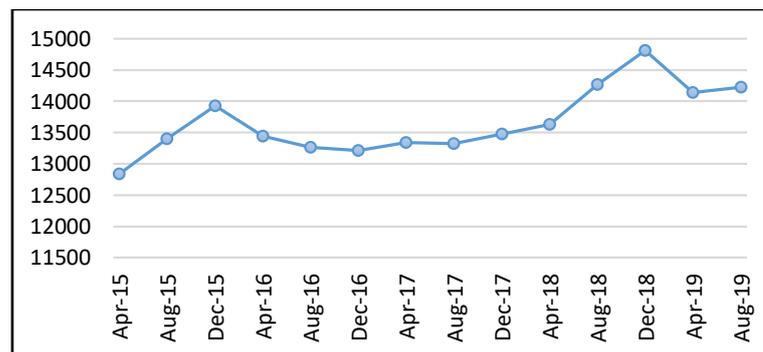
Secara garis besar rendahnya tingkat inflasi di tahun 2016 ini disebabkan karena permintaan domestik terbatas, melemahnya tekanan eksternal, dan ekspektasi inflasi yang mulai membaik (Bank Indonesia).

Selain itu, rendahnya tingkat inflasi ini disebabkan karena terjaganya pasokan bahan pangan, operasi pasar yang dilakukan BULOG dan koordinasi antara BI dan pemerintah semakin kuat (Bank Indonesia).

4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah (*kurs*)

Nilai tukar adalah harga satu mata uang yang dinyatakan terhadap mata uang lainnya atau disebut dengan *kurs* adalah pertukaran mata uang asing (valuta asing) terhadap mata uang domestik yang sesuai dengan harga pasar (Karim, 2007).

Dalam penelitian ini data nilai tukar yang digunakan ialah *kurs* tengah yang dinyatakan dari harga dollar (USD) ke dalam satuan unit rupiah. Menurut data yang diperoleh dari tahun 2015 hingga agustus 2019 ini dapat dilihat perkembangan nilai tukar (*kurs*) melalui grafik dibawah ini:



Bulan	Apr-15	Aug-15	Dec-15	Apr-16	Aug-16	Dec-16	Apr-17
Kurs	12835,88	13402,58	13929,78	13444,45	13264,63	13215,91	13337,86
Bulan	Aug-17	Dec-17	Apr-18	Aug-18	Dec-18	Apr-19	Aug-19
Kurs	13326,38	13478,26	13632,91	14267,55	14810,36	14137,98	14226,33

Sumber: Bank Indonesia (data diolah)

Gambar 4.3
Perkembangan Nilai tukar (*kurs*)
(Rupiah)

Melihat gambar grafik diatas dapat dijelaskan bahwa nilai tukar (*kurs*) setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga agustus 2019 mengalami fluktuasi, dimana nilai tukar rupiah ini sempat mengalami apresiasi–depresiasi hingga mengalami apresiasi kembali. Dilihat dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa nilai tukar tertinggi ada pada kuartal terakhir tahun 2018 artinya bahwa nilai tukar di negara Indonesia mengalami depresiasi atau melemah, sedangkan nilai tukar terendah ada pada awal tahun 2015 artinya bahwa nilai tukar (*kurs*) suatu negara tersebut mengalami apresiasi atau menguat.

Nilai tukar rendah terjadi selama kuartal pertama 2015 disebabkan karena kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) yang dapat memicu kenaikan dollar AS dan terjadinya negoisasi utang yunani yang mengoreksi *risk appetite* investor global terhadap aset domestik serta perlambatan ekonomi domestik. Namun pada kuartal ketiga 2015 nilai tukar mengalami stabilitas, dimana stabilitas tersebut ditopang oleh kebijakan suku bunga di AS. Selain itu disebabkan karena aliran masuk dana asing terutama pada obligasi negara yang ditopang dalam imbal hasil investasi di Indonesia dibandingkan obligasi negara pers (Bank Indonesia).

Nilai tukar rupiah (*kurs*) dari awal bulan februari hingga oktober pada tahun 2018 sempat mengalami depresiasi dimana nilai tukar rupiah tersebut sempat tembus lebih Rp. 15.000 /dollar AS pada bulan oktober 2018. Depresiasinya nilai tukar pada tahun 2018 disebabkan karena kenaikan FFR yang lebih cepat, kenaikan tersebut terjadi karena tidak ada

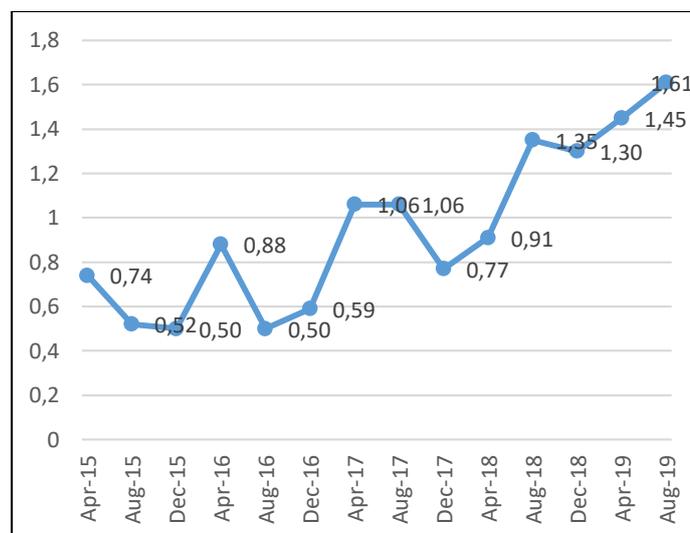
kepastian dalam kebijakan fiskal AS yang mereda akibat kongres AS saat menyetujui penghilangan batas atas utang AS, dan pemotongan pajak terutama pada korporasi. Adapun yang menyebabkan kenaikan *kurs* ini disebabkan karena peningkatan perdagangan antara AS dengan Tiongkok yang dapat mendorong kenaikan premi (jumlah uang yang harus dibayarkan) yang sangat besar terhadap negara berkembang. Selain itu, kenaikan *kurs* pada awal 2018 disebabkan karena kenaikan harga minyak dunia yang berkelanjutan. Meskipun rupiah sempat mengalami depresiasi ini pada bulan november–desember 2018 rupiah mulai terapresiasi meskipun terapresiasinya rupiah tidak seperti pada tahun sebelumnya. Terapresiasinya rupiah ini disebabkan karena adanya kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI agar rupiah kembali menguat dan didorong dengan hubungan perdagangan yang mereda serta adanya kesepakatan menghindari penambahan tarif (Bank Indonesia).

5. Perkembangan *Return On Asset* (ROA)

Rasio keuangan pada *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat kemampuan dari sebuah modal yang digunakan untuk investasi yang mencakup semua aktiva guna memperoleh sebuah laba. Dan biasanya rasio ini digunakan sebagai gambaran produktivitas atau kekayaan yang diperoleh maupun yang dipakai oleh bank. ROA dapat diperoleh melalui pembagian laba yang didapatkan oleh pihak bank (sebelum pajak) dengan total asset bank (Santoso, 1995).

Artinya bahwa semakin tinggi nilai ROA maka kinerja bank akan semakin baik.

Untuk mengetahui gambaran produktivitas atau kekayaan yang diperoleh oleh perbankan, bank dapat melihat melalui rasio keuangan *Return On Asset*. Indikator untuk melihat perkembangan kekayaan bank dapat dilihat melalui data yang diperoleh sejak 2015 hingga agustus 2019 dengan grafik dibawah ini:



Sumber: SPS-OJK (data diolah)

Gambar 4.4
Perkembangan *Return On Asset* (ROA)
(Persen)

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa setiap kuartal pertama tahun 2015 hingga kuartal kedua 2019 mengalami fluktuasi, dimana fluktuasi yang terjadi pada ROA ini mengalami pasang surut. Hal ini dibuktikan dari data kuartal pertama sebesar 0,74% menjadi 0,50% pada kuartal ketiga 2015. Namun seiring berjalannya waktu pada kuartal pertama 2016 ROA mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar

0,88% hal ini menunjukkan bahwa ROA berada dalam kondisi baik, tapi kenaikan ROA pada kuartal pertama ini tidak bisa berkelanjutan hingga akhir periode 2016. Dimana pada saat itu ROA mengalami penurunan sebesar 0,38% dari kuartal pertama 2016 sebesar 0,88 menjadi 0,50% pada kuartal kedua 2016. Meskipun mengalami penurunan namun pada kuartal ketiga ini ROA mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,59%. Namun kenaikan ROA tersebut berkelanjutan hingga kuartal kedua 2017 yang mencapai 1,06% dan pada saat itu pencapaian bank terhadap rasio keuangan ROA pada kuartal pertama 2017 hingga kuartal kedua 2017 tidak mengalami perubahan atau mengalami stagnasi. Meskipun pada kuartal ketiga 2017 ROA sebesar 0,77% yang artinya mengalami penurunan hal ini tidak berdampak buruk pada bank karena posisi tersebut masih dalam kondisi baik. Pada kuartal pertama hingga kuartal kedua 2018 ROA kembali meningkat menjadi 1,35% peningkatan ini terjadi pada kuartal kedua, meskipun dalam kuartal ketiga 2018 ROA mengalami penurunan, penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena di tahun 2019 ROA mengalami kenaikan kembali mencapai 1,61%.

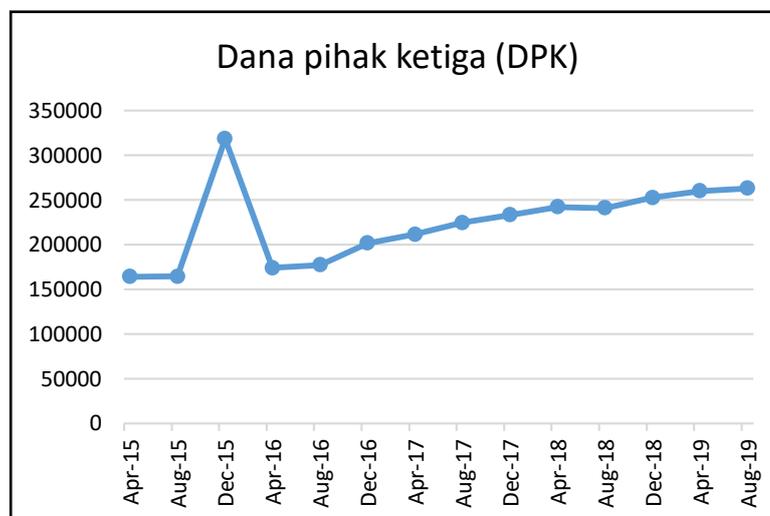
Membaihnya nilai ROA suatu perbankan syariah ini disebabkan karena adanya dorongan peningkatan pembiayaan yang disertai dengan efisiensi bank syariah yang membaik (LPKSI-OJK, 2018).

6. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang diberikan kepada bank dalam bentuk tabungan atau simpanan.

Biasanya dana yang berasal dari pihak ketiga ini dimanfaatkan bank untuk disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dimana aset terbesar bank yang diperoleh melalui DPK ini bisa mencapai 80% sampai dengan 90% (Pratiwi, 2008).

Berdasarkan data yang diperoleh perkembangan dana pihak ketiga pada bank umum syariah semenjak periode 2015 hingga agustus 2019 dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Bulan	Apr-15	Aug-15	Dec-15	Apr-16	Aug-16	Dec-16	Apr-17
DPK	164221	164283	318584	173995	177277	201794	211589
Bulan	Aug-17	Dec-17	Apr-18	Aug-18	Dec-18	Apr-19	Aug-19
DPK	224583	233364	242044	240867	252698	260049	263143

Sumber data: SPS-OJK (data diolah).

Gambar 4.5
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)
(Miliar)

Dari hasil pengamatan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa DPK setiap tahunnya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun

pada kuartal ketiga tahun 2015 DPK berada didalam tingkat tertinggi yang mencapai nilai sebesar Rp. 318.584 miliar. Meningkatnya DPK pada kuartal ketiga tahun 2015 ini disebabkan karena meningkatnya deposito, tabungan dan giro pada bank umum syariah (LPKS-OJK, 2016). Perkembangan DPK pada kuartal ketiga tahun 2015 tersebut disebabkan karena tingginya penyaluran dana kepada pihak bank, penyaluran dana terbaik tersebut berasal dari provinsi Sulawesi selatan sebesar 28%, Aceh 24%, Bengkulu dan Bangka Belitung 20% (LPKS-OJK, 2015).

Kenaikan yang terjadi pada kuartal ketiga tahun 2015 tersebut terjadi pada bulan november hingga akhirnya pada bulan desember sampai dengan februari 2016 tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan DPK pada bank umum syariah tersebut disebabkan karena peningkatan sumber dana dari kewajiban kepada pihak bank lain dan surat berharga yang diterbitkan tersebut semakin meningkat dari biasanya (LPKS-OJK, 2015). Akhirnya penurunan tersebut tidak bertahan lama dilihat pada kuartal dua 2016 hingga kuartal dua 2019 DPK mengalami kenaikan secara terus menerus hingga mencapai Rp. 263.143 pada kuartal kedua 2019.

Biasanya perkembangan DPK melambat tersebut disebabkan karena menurunnya deposito dari tahun sebelumnya serta adanya *capital outflow* seiring dengan terjadinya *fed fund rate* serta *crowding out effect* hal ini disebabkan karena adanya pengalihan dana dari masyarakat ke instrumen investasi lainnya (LPKSI-OJK, 2018).